

*Analysis of Factors Affecting The Quality of State Owned Goods Management at
UIN Sultan Thaha Saifuddin Jambi*

**Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kualitas Pengelolaan Barang Milik Negara Pada
UIN Sultan Thaha Saifuddin Jambi**

Oleh:

Kasmardin¹⁾, Sri Rahayu²⁾, Muhammad Gowon³⁾

¹⁾Alumni Magister Ilmu Akuntansi Pascasarjana Universitas Jambi tahun 2021, bekerja di UIN Sultan Thaha Saifuddin Jambi, Jambi – Indonesia

^{2&3)}F Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jambi

Email: kasmardinbadri@rocketmail.com¹⁾, sri_rahayu@unja.ac.id²⁾, Gowon@unja.ac.id³⁾

* Korespondensi

RIWAYAT ARTIKEL:

Artikel Masuk: 25 Juli 2024

Artikel Diterima: 19 Agustus 2024

ABSTRACT

The purpose of this study was to obtain empirical evidence and analyze the influence of the variables of the quality of the state civil apparatus, compliance with regulations, management information systems, and communication on the quality of state property management both simultaneously and partially and whether leadership commitment could moderate the relationship between the variable quality of civil apparatus state, compliance with regulations, management information systems, and communication with the quality of management of state property. The research design used is associative which is causal. The population in this study were employees who worked in the management of state property at UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi. Determination of the sample in this study is the questionnaire method. Data were analyzed by multiple regression analysis with the help of the SPSS program. The results of this study prove that the influence of the quality of the state apparatus, compliance with regulations, management information systems, communication and leadership commitment simultaneously has a positive and significant effect on the quality of management of state property. Partially the quality of the state apparatus, compliance with regulations, management information systems and leadership commitment have a positive and significant effect on the quality of the management of state property, while communication partially does not effect the quality of management of state property.

Keywords: BLU Performance, Quality of Human Resources, IT Utilization, SPI, and Organizational Commitment

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah untuk memperoleh bukti empiris dan menganalisis pengaruh variabel kualitas aparatur sipil negara, kepatuhan pada regulasi, sistem informasi manajemen, komunikasi dan Komitmen Pimpinan berpengaruh secara parsial dan simultan terhadap kualitas pengelolaan barang milik negara. Desain penelitian yang digunakan adalah asosiatif yang bersifat kausal. Populasi dalam penelitian ini adalah pegawai yang bekerja dalam pengelolaan barang milik negara di UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi. Penentuan sampel dalam penelitian ini adalah dengan metode kuisioner. Data dianalisis dengan metode analisis regresi berganda dengan bantuan program SPSS. Hasil Penelitian ini membuktikan bahwa pengaruh kualitas aparatur Negara, kepatuhan terhadap regulasi, sistem informasi manajemen, komunikasi dan komitmen pimpinan secara simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas pengelolaan barang milik Negara. Secara parsial kualitas aparatur negara, kepatuhan terhadap regulasi, sistem informasi manajemen dan komitmen pimpinan berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap kualitas pengelolaan barang milik Negara, sedangkan komunikasi secara parsial tidak berpengaruh terhadap kualitas pengelolaan barang milik negara.

Kata Kunci: Kualitas Pengelolaan Barang Milik Negara, Kualitas Aparatur sipil negara, Kepatuhan pada Regulasi, Sistem Informasi Manajemen, Komunikasi, Komitmen Pimpinan.

1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Reformasi keuangan negara merupakan titik awal reformasi dalam pengelolaan keuangan negara/daerah, melalui pengelolaan keuangan yang profesional dan modern Pemerintah pusat berusaha melahirkan komitmen yang kuat dalam tercapainya prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Tahapan ini dimulai dengan ditetapkannya 3 (tiga) paket Undang-undang di Bidang Keuangan Negara yaitu Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 (Indonesia, 2006) tentang Perbendaharaan Negara serta Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 (*DHendianto-Biro Hukum BPK-RI/10/16/2006 1, 2004*) tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara yang telah menjadikan barometer bagi terciptanya perubahan pengelolaan manajemen aset negara.

Perubahan pengelolaan manajemen barang milik negara/daerah didasari dengan disyahnannya PP No. 6 /2006 yang telah di ubah dengan PP No.38 tahun 2008 yang selanjutnya di ganti dengan dikeluarkannya PP No.27 tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah telah menciptakan semangat baru dalam pengelolaan aset negara dalam rangka menjamin terlaksananya tertib administrasi dan tertib pengelolaan kedepannya. Pengelolaan barang milik negara (BMN) yang professional dan modern akan mampu meningkatkan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan negara.

Pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) di dalam (Pemerintah Republik Indonesia, 2014) Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 2014, lebih fokus membenahan barang milik negara, dan peningkatkan efektifitas dan Efisiensi dan peningkatan nilai tambah dalam pemanfaatan Barang milik Negara (BMN). Oleh sebab itu, lingkup pengelolaan Barang milik negara sesuai PP nomor 27/2014 meliputi perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, pemindah tanganan, pemusnahan, penghapusan, penatausahaan, dan pembinaan, pengawasan, dan pengendalian

(Lu, 2011) menyatakan Beberapa penyebab pemerintah harus memperhatikan manajemen aset negaranya: kesatu, karena Aset tetap mempunyai umur yang panjang. Kedua, aset tetap memiliki nilai yang signifikan terhadap pengelolaan pemerintahan. Ketiga, karena aset tetap bersifat Tidak lancar. (Pinatik et al., 2015) menyatakan Aset tetap merupakan unsur yang sangat penting dan harus dikelola dan dicatat dengan sebaik mungkin agar dapat menghasilkan informasi yang andal dan dapat dipercaya dalam laporan keuangan, selanjutnya (Sulistiwati, 2016) menyatakan Perbaikan tata kelola pemerintahan menuju tata kelola pemerintah yang bertanggung jawab membutuhkan reformasi pada dua bidang utama yaitu perubahan pola

pikir sumber daya manusia aparatur dan pengembangan sistem manajemen yang terintegrasi.

UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi yang berdiri berdasarkan Surat Keputusan Menteri Agama RI Nomor 84 Tahun 1967 Tanggal 27 Juli 1967 merupakan salah satu Perguruan Tinggi Agama Islam Negeri (PTAIN) di Indonesia yang secara visioner dituntut untuk mencermati tren pengelolaan pendidikan tinggi nasional lainnya baik dalam negeri maupun luar negeri agar bisa optimal berperan merealisasikan tujuan pendidikan nasional dalam upaya mencerdaskan kehidupan bangsa. Satuan Kerja BLU pengelolaan Aset bisa menjadi inovasi dalam pemanfaatan aset BMN untuk meningkatkan pendapatan PNBPN dari aset. Badan Layanan Umum akan secara langsung mengatur sendiri pemanfaatan dalam pengelolaan BMN.

Memperhatikan besarnya jumlah aset yang dimiliki terutama sekali Aset tetap, memungkinkan bagi UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi untuk melaksanakan pengelolaan aset BMN secara lebih baik dan teratur. Hartoyo Nafsi (2014), Pengelolaan Barang Milik Negara yang benar dapat menciptakan penatausahaan barang milik negara dan merupakan sumber daya terbaik bagi pemerintah untuk menambah pendapatan Negara Non Pajak (PNBP). Oleh sebab itu, sangat perlu pemerintah negara/daerah agar dapat melakukan pengelolaan barang milik Negara secara baik dan memadai.

Peranan Sistem Informasi manajemen adalah Suatu upaya untuk mengembangkan penyalenggaraan pemerintahan yang berbasis elektronik. Suatu penataan sistem manajemen dan proses kerja di lingkungan pemerintah dengan mengoptimalkan pemanfaatan sistem informasi dan komunikasi. SIMAK BMN adalah sistem informasi yang memanfaatkan sistem informasi yang dapat memfasilitasi pengelolaan informasi administrasi penatausahaan barang milik negara di satuan kerja (satker) di kementerian/lembaga pusat dan daerah (Peraturan Pemerintah No. 6 thn 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah). Penelitian Simamora dan Halim (2012) menjelaskan bahwa pengelolaan aset tetap dapat berpengaruh terhadap keandalan laporan Keuangan.

Komunikasi pemerintahan digunakan untuk mengelola hubungan aparatur dan bertujuan agar aparatur mengetahui dan memahami apa dan bagaimana yang harus di kerjakan dan nantinya dapat memberikan informasi bagi eksekutif pemerintah untuk mendapatkan informasi tentang hasil pekerjaan, yang semuanya bertujuan untuk mencapai tujuan-tujuan organisasi pemerintah secara efektif dan efisien. Penelitian Mega (2016) menjelaskan bahwa komunikasi secara parsial tidak berpengaruh terhadap kualitas pengelolaan barang milik negara pada SKPD Pemerintah Kota Tebing Tinggi, hal ini bertolak belakang dengan penelitian Inayah (2010) yang menunjukkan adanya pengaruh signifikan antara variable komunikasi dalam mempengaruhi

implementasi kebijakan pengelolaan barang milik negara Kota Tangerang.

Walaupun secara Kuantitas Aset Tetap pada UIN STS Jambi selalu meningkat dari tahun ke tahun tetapi belum bisa memberikan pengaruh yang nyata terhadap peningkatan pendapatan Badan Layanan Umum (BLU), hal ini disebabkan belum optimalnya pemanfaatan aset yang dilakukan di UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi. Selain dari itu dalam pengelolaan Aset terdapat juga beberapa permasalahan yaitu berupa penguasaan lahan berupa tanah oleh masyarakat sekitar selanjutnya masih adanya temuan BPK RI yang menjadi catatan penting terutama Pengelolaan barang milik negara kementerian agama RI yang belum di kelola dengan baik khususnya di UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.

Peran pimpinan dalam hal ini sangatlah besar dalam pengelolaan barang dan dengan adanya peranan langsung dari pimpinan diharapkan dapat menyelesaikan kendala-kendala yang terjadi selama proses inventarisasi barang ataupun kendala-kendala yang berhubungan dengan penatausahaan Barang Milik Negara/Daerah. Komitmen pimpinan diharapkan berperan dalam pelaksanaan penatausahaan barang milik negara. Menurut Simamora (2012) faktor kepemimpinan merupakan sesuatu yang sangat penting, khususnya dalam institusi pemerintahan karena institusi yang bersifat birokratis, seorang pemimpin yang patuh dan taat pada peraturan akan dapat mempengaruhi aparatur di bawahnya untuk ikut serta dalam melaksanakan peraturan tersebut.

Pernyataan diatas juga didukung oleh hasil-hasil kajian empiris lainnya diantaranya adalah; Munaim (2012), Azhar (2013) , Mega prima nova (2016) dan Rosihan, Westim Ratang ,Bonifasia EB, (2017) yang menyatakan bahwa Kualitas aparatur negara, regulasi dan sistem informasi berpengaruh terhadap pengelolaan barang milik negara. Menariknya azhar (2013) menyatakan Kualitas aparatur Negara tidak berpengaruh terhadap manajemen asset, Sri wahyuni (2018) menyatakan pemanfaatan sistem informasi tidak berpengaruh terhadap pengelolaan barang milik negara selanjutnya Pekei,Beni,et.al (2014) Sumber daya Manusia tidak secara signifikan mempengaruhi efektifitas manajemen asset lokal pada provinsi Jayapura.

Peneliti terdorong untuk mendalami dan mengkaji lebih dalam faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas pengelolaan barang milik negara pada UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi. Adapun yang dipandang menjadi faktor-faktor yang mempengaruhi adalah kualitas aparatur negara, kepatuhan pada regulasi, sistem informasi manajemen, komunikasi dan komitmen pimpinan yang diduga mempengaruhi kualitas pengelolaan barang milik negara di UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian di atas, maka dapat disimpulkan masalah penelitian ini sebagai berikut:

1. Apakah kualitas aparatur negara berpengaruh terhadap kualitas pengelolaan barang milik Negara di UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi?
2. Apakah kepatuhan pada regulasi berpengaruh terhadap kualitas pengelolaan barang milik Negara di UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi?
3. Apakah sistem informasi manajemen berpengaruh terhadap kualitas pengelolaan barang milik Negara di UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi?
4. Apakah komunikasi berpengaruh terhadap kualitas pengelolaan barang milik Negara di UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi?
5. Apakah komitmen pimpinan berpengaruh terhadap kualitas pengelolaan barang milik Negara di UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi?
6. Apakah kualitas aparatur negara, kepatuhan pada regulasi, sistem informasi manajemen, komunikasi serta komitmen pimpinan berpengaruh secara simultan terhadap kualitas pengelolaan barang milik Negara di UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi?

1.3. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk:

1. Untuk menganalisis pengaruh kualitas aparatur negara terhadap kualitas pengelolaan barang milik Negara di UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi;
2. Untuk menganalisis pengaruh kepatuhan pada regulasi terhadap kualitas pengelolaan barang milik Negara di UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi;
3. Untuk menganalisis pengaruh sistem informasi manajemen terhadap kualitas pengelolaan barang milik Negara di UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi;
4. Untuk menganalisis pengaruh komunikasi terhadap kualitas pengelolaan barang milik Negara di UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi;
5. Untuk menganalisis pengaruh Komitmen pimpinan kualitas pengelolaan barang milik Negara di UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi;
6. Apakah kualitas aparatur negara, kepatuhan pada regulasi, sistem informasi manajemen, komunikasi serta komitmen pimpinan berpengaruh secara simultan terhadap kualitas pengelolaan barang milik Negara di UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.

2. TINJAUAN PUSTAKA DAN PERUMUSAN HIPOTESIS

2.1. Pengelolaan Barang Milik Negara

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No 27 thn 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara, pengertian barang milik negara/ daerah meliputi semua barang

yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; atau barang yang berasal dari perolehan lainnya yang sah. Perolehan lainnya yang sah, yaitu barang yang diperoleh dari hibah/sumbangan atau yang sejenis; barang yang diperoleh sebagai pelaksanaan dari perjanjian/kontrak; barang yang diperoleh sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; atau barang yang diperoleh berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.

2.2. Kualitas Aparatur Negara

Terkait kompetensi aparatur negara pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara menyebutkan jenis-jenis kompetensi aparatur negara, yakni: (a) kompetensi teknis yang diukur dari tingkat dan spesialisasi pendidikan, pelatihan teknis fungsional, dan pengalaman bekerja secara teknis; (b) kompetensi manajerial yang diukur dari tingkat pendidikan, pelatihan struktural atau manajemen, dan pengalaman kepemimpinan; dan (c) kompetensi sosial kultural yang diukur dari pengalaman kerja berkaitan dengan masyarakat majemuk dalam hal agama, suku, dan budaya sehingga memiliki wawasan kebangsaan. Sulistiawati (2016) kualitas sumber daya manusia merupakan suatu ukuran yang menyatakan seberapa jauh seorang tenaga kerja atau pegawai memenuhi persyaratan, spesifikasi, dan harapan dalam perannya dalam mendapat sasaran yang sudah ditetapkan dalam perusahaan. (Azhar, 2017b) menjelaskan Dalam menjalankan tupoksinya staf pengurus dan penyimpan barang, diharapkan untuk memiliki kapasitas atau kompetensi yang diukur dari latar belakang pengalaman, pendidikan, dan bimbingan teknis yang pernah diikutinya yang sesuai dengan tugas dan fungsi tugasnya.

2.3. Kepatuhan Terhadap Regulasi

Setiap Instansi Pemerintah baik yang ada di pusat ataupun di daerah dalam menjalankan program kegiatannya wajib mengikuti peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) Republik Indonesia Nomor 27 tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, dinyatakan bahwa penatausahaan barang milik Negara/daerah (BMN) harus dilaksanakan secara teratur dengan berpedoman pada asas kepastian hukum, asas fungsional, asas transparan, asas efisiensi dan efektif, asas akuntabel dan asas kepastian nilai. Taat pada aturan perundang-undangan yang berlaku maksudnya adalah bahwa penatausahaan Barang Milik Negara/daerah harus berdasarkan pada aturan yang mengatur tata kelola barang milik negara berupa aturan perundang-undangan yang berlaku atau peraturan lain yang berhubungan dengan tahapan pengelolaan BMN.

2.4. Sistem Informasi Manajemen

Hall dalam hamzah (2009), menyatakan sistem informasi merupakan suatu cara yang menjelaskan

kepada para pemakai bagaimana data dikumpulkan, diproses dan didistribusikan. Di karenakan adanya beragam kebutuhan informasi maka dalam sistem informasi di perlukan adanya klasifikasi alur dari pengguna informasi. Sistem informasi memiliki beberapa kriteria yaitu terdiri dari fleksibel, efektif dan efisien. Fleksibel berarti sistem informasi bisa dimanfaatkan bagi berbagai kalangan dan bisa di modifikasi sesuai kemajuan sistem informasi. Efektif berarti hasil yang di dapat bisa di ukur dalam mencapai tujuan yang sudah di tetapkan. Efisien berarti biaya yang diperlukan sedikit dan hasil yang diharapkan cukup banyak.

Jogiyanto.(2005) Sistem Informasi merupakan alat di dalam organisasi yang digunakan sebagai katalisator didalam fungsi manajemen strategik dengan pengelolaan transaksi harian untuk dapat menyediakan laporan-laporan yang di perlukan bagi pihak luar.

Pemanfaatan sistem informasi dapat berupa (a) pengolahan data, pengolahan informasi, sistem manajemen dan proses kerja secara elektronik; dan (b) pemanfaatan kemajuan sistem informasi agar pelayanan publik dapat diakses dengan mudah dan murah oleh masyarakat di seluruh wilayah negara. Pemanfaatan sistem informasi, khususnya pengelolaan informasi dan transaksi elektronik, mempunyai peranan yang sangat penting untuk meningkatkan kinerja organisasi/instansi pemerintahan dalam kerangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat dan percepatan pelaksanaan e-government (Hamzah, 2009)

2.5. Komunikasi

Komunikasi pemerintahan menurut (Silalahi, 2004) adalah merupakan komunikasi antar manusia (*human communication*) yang terjadi dalam konteks organisasi pemerintahan dan arus penyampaian dan penerimaan pesan dilakukan melalui jaringan yang sifat hubungannya saling tergantung satu sama lain berdasarkan aturan-aturan formal. (Munandar & Suherman, 2016) Dalam komunikasi, komunikator merupakan salah satu faktor yang menentukan efektivitas komunikasi. Berdasarkan Edward III (1980:10) dalam (Umum et al., 2010), perintah atau pesan yang disampaikan dalam implementasi kebijakan harus disalurkan kepada orang yang tepat, isi perintah atau pesan jelas, akurat dan konsisten. Indikator-indikator untuk mengukur keberhasilan komunikasi dalam implementasi kebijakan, yakni: Transmission atau penyaluran komunikasi; Kejelasan komunikasi dan Konsistensi komunikasi.

2.6. Komitmen Pimpinan

Kepimpinan memegang peranan penting dalam manajemen, karena adanya keterbatasan- keterbatasan tertentu yang dimiliki dalam diri manusia, timbullah kebutuhan memimpin dan dipimpin. (Mukhtar, 2016) kepemimpinan adalah sekumpulan dari serangkaian kemampuan dari sifat-sifat kepribadian, termasuk didalamnya kewibawaan, untuk di jadikan sarana dalam

rangka menyakinkan yang dipimpinnnya agar mereka mau dan dapat melaksanakan tugas-tugas yang di bebaskan kepadanya dengan rela, penuh semangat, ada kegembiraan batin, serta merasa tidak terpaksa. Oleh karena itu seorang pimpinan yang mempunyai sifat-sifat kepribadian yang baik akan lebih mudah untuk di terima oleh anggotanya. Karena para pemimpin juga menjalankan sebuah fungsi dan perannya yang sangat penting. juga untuk mencoba untuk memahami persoalan-persoalan yang di hadapi para anggota ketika mereka menjalankan profesinya.

Selanjutnya Syamsul Aripin (2017) mendefinisikan Kepemimpinan bentuk dominasi didasari kemampuan pribadi, yang sanggup mendorong atau mengajak orang lain untuk berbuat sesuatu berdasarkan akseptansi/penerimaan oleh kelompoknya, dan memiliki keahlian khusus yang tepat bagi situasi khusus (informal). Perkepalaan/headship atau pemimpin institusional dikaitkan dengan kekuasaan formal. Arifin Tahir, (2014) menyatakan Kepemimpinan merupakan faktor yang sangat penting dalam mempengaruhi prestasi organisasi karena kepemimpinan merupakan aktivitas yang utama dengan mana tujuan organisasi dapat dicapai.

Meyer, Allen, dan Smith (1998) mengemukakan ada tiga dimensi komitmen organisasional, yaitu:

- a. *Affective commitment*, terjadi apabila karyawan ingin menjadi bagian dari organisasi karena adanya ikatan emosional;
- b. *Continuance commitment*, muncul apabila karyawan tetap bertahan pada suatu organisasi karena membutuhkan gaji dan keuntungan lain, atau karena tidak menemukan pekerjaan lain;
- c. *Normative commitment*, timbul dari nilai-nilai dalam diri karyawan. Karyawan bertahan menjadi anggota organisasi karena adanya kesadaran bahwa komitmen terhadap organisasi merupakan hal yang seharusnya dilakukan.

(Simamora & Halim, 2012) komitmen pimpinan diperlukan dalam mengatasi permasalahan yang menyangkut pengelolaan barang milik Negara/daerah. Hal-hal yang penting diperhatikan Kepala Satker dalam pengelolaan barang milik negara/daerah yang lebih baik, diantaranya adalah:

1. Tidak sering melakukan pergantian personal pengurus dan penyimpan barang. Pengurus dan penyimpan barang harus bekerja 1 (satu) tahun anggaran sesuai dengan surat keputusan pengangkatan. Jika pergantian petugas pengelola barang diperlukan harus ada kaderisasi terlebih dahulu terhadap penggantinya;
2. Kepala Satker memberikan perhatian serius bagi barang milik daerah yang dikelolanya secara profesional;
3. Tidak memomorduakan urusan pengelolaan barang milik daerah, karena posisi kepala satker selain sebagai pengguna anggaran juga sebagai pengguna barang yang bertanggungjawab terhadap barang milik negara/ daerah yang dikelolanya.

2.7. Kerangka Pemikiran

2.7.1. Pengaruh Kualitas Aparatur Negara terhadap Kualitas Pengelolaan barang milik Negara

Kualitas aparatur Negara adalah suatu standar yang harus di capai oleh aparatur negara yang terlibat dalam pengelolaan Barang Milik Negara. Penelitian Lucky Nugroho (2017) memberikan bukti bahwa Kompetensi aparatur sangat diperlukan sebagai sumberdaya manusia yang dimiliki perusahaan. Hal ini dapat ditingkatkan dengan berbagai cara, seperti diadakannya pelatihan maupun sosialisasi. Dengan kompetensi yang memadai diharapkan aparatur dapat menghasilkan kualitas informasi akuntansi BMN yang baik.

Bukti adanya pengaruh kemampuan aparatur negara terhadap kualitas pengelolaan barang milik negara dikemukakan oleh Sri Wahyuni, Isti Fadah, Diana Sulianti Tobing (2018) yang mengemukakan bahwa Kompetensi sumber daya manusia berpengaruh terhadap pengelolaan barang milik Negara/daerah, semakin tinggi tingkat kompetensi sumber daya manusia maka pengelolaan barang milik negara/daerah semakin baik.

Kualitas aparatur daerah dan regulasi secara bersama-sama berpengaruh secara signifikan terhadap manajemen aset pada SKPD di Pemko Banda Aceh Iqlima Azhar (2017) dengan demikian dapat disimpulkan bahwa kualitas aparatur Negara akan berpengaruh terhadap kualitas pengelolaan barang milik Negara. Seharusnya dengan adanya aparatur yang berkualitas dalam pengelolaan barang milik Negara maka akan menghasilkan pengelolaan barang milik Negara yang lebih baik.

2.7.2. Pengaruh Kepatuhan Terhadap Regulasi terhadap Kualitas Pengelolaan Barang Milik Negara

Suatu kepatuhan dari regulasi oleh pelaksana seharusnya berpengaruh terhadap kualitas pengelolaan barang milik Negara. Penelitian yang dilakukan oleh Azhar (2017) mengemukakan bahwa regulasi berpengaruh terhadap manajemen aset sejalan dengan penelitian tersebut Lu (2011:161) menyimpulkan Regulasi, kebijakan, dan prosedur sangatlah penting dalam pengelolaan BMN sebagai pedoman yang merupakan prinsip kerja dan petunjuk secara luas maupun spesifik tentang bagaimana aktiva tetap seharusnya dikelola. Oleh karena itu, regulasi diduga berpengaruh terhadap manajemen asset.

2.7.3. Pengaruh Sistem Informasi Manajemen terhadap Kualitas Pengelolaan Barang Milik Negara

Penelitian yang dilakukan Darno (2012) menunjukkan bahwa adanya pengaruh yang signifikan antara pemanfaatan Sistem informasi terhadap kualitas pelaporan aset Negara/daerah. Penelitian Ardian Prima Atmaja, Fredy Susanto (2019) hasilnya menunjukkan Aplikasi SIMAK-BMN

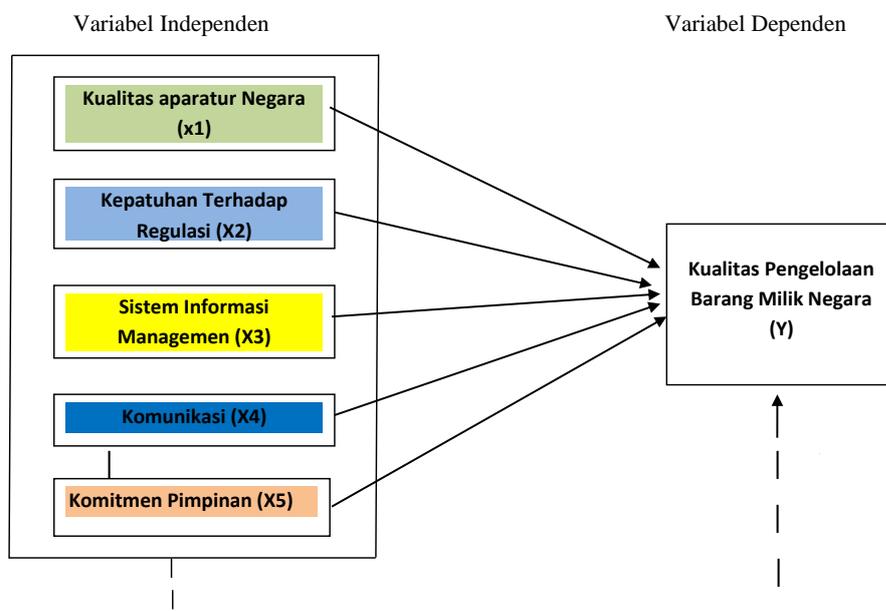
yang bersifat *stand alone* telah berhasil dilakukan optimasi, yakni yang menyatakan dengan mengembangkannya menjadi sistem monitoring BMN terpadu yang terdiri dari sistem berbasis web membantu tim inventaris dalam melakukan kegiatan inventarisasi menjadi lebih mudah, cepat dan akurat. Selain itu, dengan adanya sistem yang saling terintegrasi tersebut, pihak Bagian Umum dan Kuasa Pengguna Anggaran dapat dengan mudah melakukan monitoring terhadap aset-aset BMN yang ada di satuan kerjanya.

Penelitian yang dilakukan oleh Nancy (2015) menunjukkan Adanya pola komunikasi yang intensif, dimana sosialisasi dan koordinasi dilaksanakan secara komprehensif kepada stakeholder pengambil kebijakan sampai kepada unit yang paling bawah. Kejelasan komunikasi dalam kebijakan pengelolaan barang milik daerah akan mewujudkan tertib administrasi dan mengetahui dengan jelas tujuannya antara lain pembukuan, inventarisasi dan pelaporan.

Sejalan dengan hal tersebut, Penelitian yang dilakukan oleh Munaim (2012) juga menunjukkan bahwa faktor komunikasi dalam implementasi Hasil penelitian Munaim (2012), menyatakan adanya komitmen pimpinan dalam pelaksanaan peraturan dan petunjuk teknis pelaksanaan pengelolaan barang milik daerah merupakan faktor pendukung terlaksananya kebijakan pengelolaan barang milik daerah di setiap SKPD pada Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat. Selanjutnya Penelitian Gusman (2012) sebgus

2.8. Model Penelitian

Adapun model dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:



Sumber: Data olahan, 2021

Gambar 1. Model Penelitian

Penelitian Mita Arlini, Darwanis, Syukriy Abdullah (2014) menunjukkan semakin baik sistem informasi yang digunakan akan menghasilkan manajemen aset yang andal, akurat dan tepat waktu. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Azhar (2017) bahwa sistem informasi berpengaruh terhadap manajemen aset. Oleh karena itu, sistem informasi diduga berpengaruh terhadap manajemen aset.

2.7.4. Pengaruh Komunikasi terhadap Kualitas Pengelolaan Barang Milik Negara

kebijakan pengelolaan barang milik daerah sudah berjalan cukup baik, melalui komunikasi langsung maupun melalui berbagai media, pelatihan dan pendidikan, serta sosialisasi kebijakan. Terbangunnya komunikasi yang baik terhadap kebijakan pengelolaan barang milik Negara/daerah disebabkan oleh substansi komunikasi yang jelas. Proses komunikasi yang baik dari para implementor kepada staf pelaksana dan para penerima manfaat akan berpengaruh terhadap kualitas pengelolaan aset

2.7.5. Pengaruh Komitmen Pimpinan terhadap Kualitas Pengelolaan Barang Milik Negara

apapun suatu peraturan disusun, tanpa adanya komitmen dari pimpinan untuk menerapkan peraturan tersebut maka peraturan tersebut tidak akan berhasil dalam penerapannya. Oleh karena itu, kepatuhan pada regulasi yang dilakukan oleh para pelaksana pengelola barang milik negara membutuhkan komitmen pimpinan.

2.8. Hipotesis

Berdasarkan kerangka konseptual yang dibentuk, maka hipotesis dalam penelitian ini dapat dijabarkan sebagai berikut:

- H1: Kualitas Aparatur Negara berpengaruh terhadap kualitas pengelolaan barang milik negara;
- H2: Kepatuhan Terhadap Regulasi berpengaruh terhadap kualitas pengelolaan barang milik negara;
- H3: Sistem Informasi Manajemen berpengaruh terhadap kualitas pengelolaan barang milik negara;
- H4: Komunikasi berpengaruh terhadap kualitas pengelolaan barang milik negara;
- H5: Komitmen Pimpinan berpengaruh terhadap kualitas pengelolaan barang milik negara;
- H6: Kualitas Aparatur Negara, Kepatuhan Terhadap Regulasi, Sistem Informasi Manajemen, komunikasi dan komitmen pimpinan berpengaruh secara simultan terhadap kualitas pengelolaan barang milik negara.

3. METODOLOGI PENELITIAN

3.1. Objek dan subjek penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dengan paradigma kuantitatif. Data yang digunakan dalam penelitian ini berupa data primer dan sekunder. Data primer melalui pengumpulan data dengan teknik survey menggunakan kuisioner dan data sekunder yaitu data yang diterbitkan atau digunakan oleh organisasi yang bukan pengolahnya. Data sekunder diperoleh seperti struktur organisasi, laporan keuangan, hasil monitoring dan evaluasi yang dilakukan oleh lembaga terkait terhadap pengelolaan Aset dan lainnya. Hasil kuisioner digunakan untuk mendapatkan data tentang variabel-variabel yang diteliti dalam penelitian ini.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan yang dilakukan secara cross sectional yaitu melibatkan suatu waktu tertentu dengan banyak sampel yang hanya dapat digunakan sekali dalam suatu periode pengamatan untuk menguji hubungan Kualitas Aparatur Sipil Negara, Kepatuhan terhadap regulasi, Sistem informasi manajemen, komunikasi dan komitmen pimpinan terhadap kualitas pengelolaan barang milik negara pada UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.

Dalam penelitian ini penentuan sampel dilakukan dengan kriteria, yaitu:

- a. Pejabat yang memiliki jabatan berkaitan dengan pengelolaan BMN (KPB, PPK, PPSPM, Pejabat Pengadaan, Kabag, Kasubbag, Kasubbag Lembaga/Pusat/Unit dan SPI)

- b. Pegawai yang Terlibat dan bertanggungjawab langsung dalam proses pelaksanaan pengelolaan Barang BMN.

Pengukuran variabel pada penelitian ini menggunakan metode likert dengan skala interval, yaitu suatu metode yang di desain untuk menelaah seberapa kuat subjek setuju atau tidak setuju dengan pernyataan pada skala 5 titik dengan susun. respon terhadap sejumlah item yang berkaitan dengan konsep atau variabel tertentu kemudian di sajikan kepada tiap responden. skala interval dan perbedaan dalam respon antara dua titik pada skala tetap sama menurut Uma Sekaran (2014).

3.2. Operasional Variabel

Definisi operasional dari masing-masing variabel merupakan definisi yang dijadikan sebagai dasar untuk menentukan besarnya nilai dari masing-masing variabel baik variabel dependen yaitu kualitas pengelolaan barang milik negara (Y) dan variabel independen yaitu kualitas aparatur daerah (X1), kepatuhan pada regulasi (X2), sistem informasi manajemen (X3), komunikasi (X4) serta Komitmen Pimpinan (X5).

3.3. Analisis Data

Kuisioner yang telah terkumpul dan diisi oleh responden kemudian dikuantitatifkan dengan menggunakan skala interval dan pembobotan skala dengan metode likert, sehingga menghasilkan keluaran berupa angka yang selanjutnya dianalisis melalui program *Statistical Package for Social Science (SPSS)*. Metode analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode *analisis regresi linear berganda (multiple regression analysis)* dan menggunakan uji statistik yang terdiri dari uji kualitas data mencakup uji validitas dan uji reliabilitas, uji asumsi klasik mencakup uji normalitas, uji multikolinearitas, dan uji heterokedastisitas, uji hipotesis mencakup uji statistik F (simultan) dan uji statistik t (parsial).

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1. Deskripsi Penelitian

Deskripsi data setiap variabel penelitian dapat dilihat seperti ditunjukkan pada tabel 1 sebagai berikut:

Tabel 2. Distripsi Data Setiap Variabel

Descriptive Statistics						
	N	Minimum	Maximum	Sum	Mean	Std. Deviation
KAN	62	11.00	30.00	1498.00	24.1613	4.43974
KTR	62	16.00	40.00	1873.00	30.2097	6.35336
SIM	62	11.00	30.00	1426.00	23.0000	4.13303
KOMUNIKASI	62	17.00	43.00	2016.00	32.5161	6.28749
KOMPIM	62	13.00	35.00	1580.00	25.4839	5.23463
KPBMN	62	29.00	59.00	2895.00	46.6935	8.17551
Valid N (listwise)	62					

Sumber: Data Penelitian, 2020 (Data diolah)

Dari tabel 2 di atas, nampak bahwa rata-rata jumlah skor kualitas aparatur negara (X_1) sebesar 24,16 sudah mendekati skor maksimum idealnya 30. Rata-rata jumlah skor kepatuhan terhadap regulasi (X_2) sebesar 30,21 sudah mendekati jumlah maksimum idealnya yaitu 40. Rata-rata jumlah skor sistem informasi manajemen (X_3) sebesar 23,00 sudah mendekati skor maksimum idealnya yaitu 30. Rata-rata jumlah skor komunikasi (X_4) sebesar 32,52 sudah mendekati jumlah maksimumnya yaitu 43. Rata-rata jumlah skor komitmen pimpinan (X_5) sebesar 25,48 sudah mendekati jumlah maksimumnya yaitu 35. Sementara itu, rata-rata jumlah skor kualitas pengelolaan barang milik negara (Y) sebesar 46,69 sudah mendekati jumlah maksimum idealnya yaitu 59. Faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas pengelolaan barang milik negara pada UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi dapat diketahui seberapa besar tingkatan/ nilainya dengan menggunakan analisis deskriptif prosentase. Hasil analisisnya dapat dilihat seperti dibawah ini.

Pengukuran kualitas aparatur negara dalam penelitian ini menggunakan sembilan item pertanyaan. Hal ini terlihat dari dukungan setuju pada item pernyataan rata-rata hampir berjumlah 23 responden atau mencapai persentase 37,63 %. Hal ini menunjukkan bahwa variabel kualitas aparatur negara dalam keadaan baik dengan katagori penilaian dalam kategori tinggi, karna nilai rata- rata sebesar 24,16 terletak dalam rentang 20,4 - 25,2 dan standar deviasinya sebesar 4,44.

Pengukuran kepatuhan terhadap regulasi dalam penelitian ini menggunakan delapan item pernyataan. Hal ini terlihat dari dukungan responden dengan persentase yang setuju rata-rata berjumlah 26 respoden atau 41,33 %. Sehingga berdasarkan analisis deskriptif tersebut dapat disimpulkan bahwa kepatuhan terhadap regulasi pada UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi berada pada kategori tinggi. Hal ini dikarenakan nilai

rata-rata sebesar 30,21 terletak dalam rentang nilai 27,2 - 33,6 dan standar deviasinya sebesar 6,35.

Pengukuran sistem informasi manajemen dalam penelitian ini menggunakan sembilan item pernyataan. sistem informasi manajemen pada UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi ditinjau dari indikator-indikator yang tertuang dalam item pernyataan termasuk dalam kategori tinggi. Hal ini terlihat dari dukungan setuju pada item pernyataan rata-rata berjumlah 31 responden atau mencapai persentase rata-rata 50,54 %. Sehingga nilai rata-rata sebesar 23,00 terletak dalam rentang 20,4 - 25,2 dan standar deviasinya sebesar 4,13.

Pengukuran komunikasi dalam penelitian ini menggunakan sembilan item pernyataan. komunikasi pada UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi tinjau dari indikator-indikator yang tertuang dalam item pernyataan termasuk dalam kategori tinggi. Hal ini terlihat dari dukungan setuju pada setiap item pernyataan rata-rata berjumlah 27 responden atau mencapai persentase 43,54 %. Sehingga nilai rata-rata sebesar 32,52 terletak dalam rentangan 30,6 - 37,8 dan standar deviasinya sebesar 6,29.

Pengukuran komitmen pimpinan dalam penelitian ini menggunakan tujuh item pernyataan. komitmen pimpinan pada UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi ditinjau dari indikator-indikator yang tertuang dalam item pernyataan termasuk dalam kategori tinggi. Hal ini terlihat dari dukungan setuju pada setiap item pernyataan rata-rata berjumlah 31 responden atau mencapai persentase 49,30%. komitmen organisasi termasuk dalam kategori tinggi, karena nilai rata-rata sebesar 25,48 terletak dalam rentangan 23,8 - 29,4 dan standar deviasinya sebesar 5,24.

Pengukuran kualitas pengelolaan barang milik negara dalam penelitian ini menggunakan dua belas item pernyataan. Kualitas pengelolaan barang milik negara pada UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi ditinjau dari indikator-indikator yang tertuang dalam

item pernyataan termasuk dalam kategori tinggi. Hal ini terlihat dari dukungan setuju pada setiap item pernyataan rata-rata berjumlah 23 responden atau mencapai persentase 36,96 %. Kualitas pengelolaan barang milik negara termasuk dalam kategori tinggi, karena nilai rata-rata sebesar 46,69 terletak dalam rentang 40,8 - 50,4 dan standar devisinya sebesar 8,17. Adapun secara keseluruhan deskripsi variabel penelitian menunjukkan bahwa kualitas aparatur negara, kepatuhan terhadap regulasi, sistem informasi manajemen, komunikasi, komitmen pimpinan dan kualitas pengelolaan barang milik negara pada UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi sudah cukup baik.

4.2. Uji Kualitas Instrumen dan data

4.2.1. Uji Validitas

Pada penelitian ini jumlah sampel yang digunakan sebanyak 62, maka $df = 62 - 2 = 60$. Dengan demikian $df=60$, $\alpha=0,05$ sehingga diperoleh r tabel=0,25.

Dilihat hasil uji validitas terhadap variabel kualitas pengelolaan Barang Milik Negara, kualitas aparatur negara, kepatuhan pada regulasi, sistem informasi manajemen, komunikasi dan komitmen pimpinan menunjukkan bahwa nilai r hitung pada setiap item pertanyaan lebih besar dari nilai r tabel, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa seluruh item pertanyaan pada variabel penelitian bernilai valid.

4.2.2. Uji Reabilitas

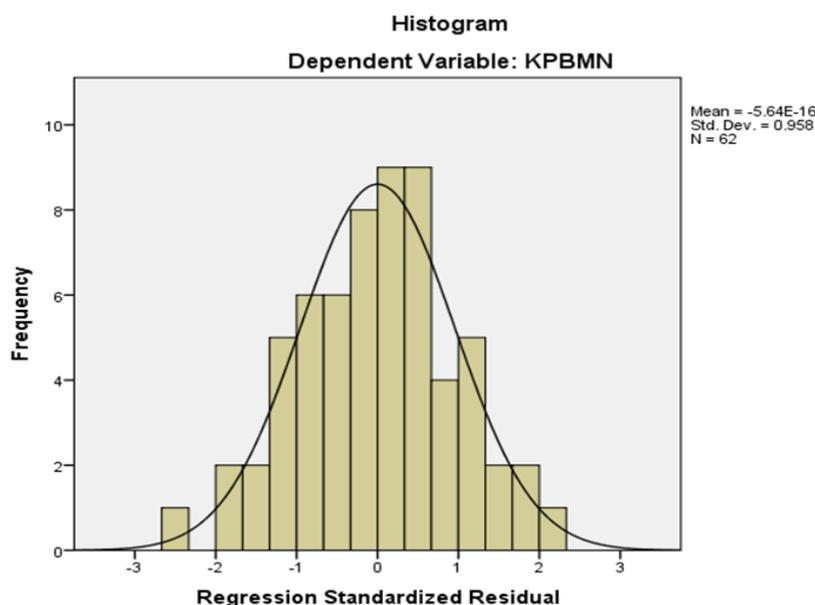
Hasil pengujian terhadap reliabilitas kuesioner menghasilkan angka *Cronbach' Alpha* lebih dari 0,7. Berdasarkan hasil ini dapat dinyatakan bahwa semua pernyataan dari variabel kualitas pengelolaan barang milik negara (Y), kualitas aparatur negara (Variabel X_1), kepatuhan pada regulasi (Variabel X_2), sistem informasi manajemen (Variabel X_3), komunikasi (Variabel X_4), komitmen pimpinan (Variabel X_5) teruji reliabilitasnya sehingga dinyatakan reliabel.

4.3. Uji Asumsi Klasik

4.3.1. Uji Normalitas

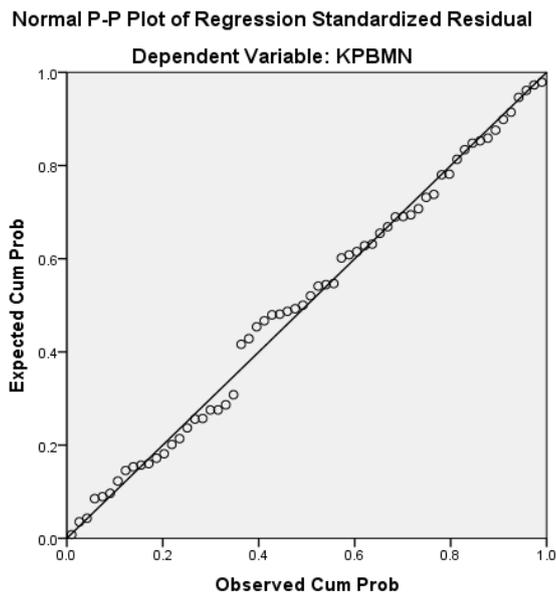
Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi variabel terikat (dependen) dan variabel bebas (independen) memiliki distribusi normal. Modal regresi yang baik adalah jika distribusi data normal atau mendekati normal (Ghozali, 2018).

Hasil dari pengujian analisis grafik, pengujian dilakukan dengan melihat grafik histogram dan grafik normal p-plot. Grafik histogram menggambarkan pola distribusi yang seimbang dan normal. Hasil yang sama ditunjukkan pada grafik normal p-plot, dimana terlihat titik-titik menyebar di sekitar garis diagonal dan penyebarannya mendekati garis diagonal. Kedua grafik ini menunjukkan bahwa model regresi tidak menyalahi asumsi normalitas.



Sumber: Data Penelitian, 2020 (Data diolah)

Gambar 2 . Grafik Histogram



Sumber: Data Penelitian, 2020 (Data diolah)

Gambar 3. Grafik Normal P-P Plot

Hasil uji normalitas dengan metode statistik *one sample Kolmogorov – Smironov* dapat dilihat dari tabel berikut:

**Tabel 3. Hasil Uji Normalitas
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test**

		Unstandardized Residual
N		62
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	,0000000
	Std. Deviation	4,41207919
Most Extreme Differences	Absolute	,065
	Positive	,060
	Negative	-,065
Test Statistic		,065
Asymp. Sig. (2-tailed)		,200 ^{c,d}

- a. Test distribution is Normal.
- b. Calculated from data.
- c. Lilliefors Significance Correction.
- d. This is a lower bound of the true significance.

Sumber: Data Penelitian, 2020 (Data diolah)

Dari hasil output pada tabel 3 di atas dapat dilihat bahwa nilai Asymp. Sig. (2tailed) = 0,200, maka sesuai ketentuan $0,200 > 0,05$ maka dengan demikian dapat di simpulkan bahwa melalui uji statistik terbukti data residual berdistribusi normal.

Pengujian ada atau tidaknya multikolinieritas didalam model regresi dapat dilakukan dengan melihat

nilai toleranc dan nilai variance inflation factor (VIF). Kedua ukuran ini menunjukkan setiap variabel independen manakah yang dijelaskan oleh variabel independen lainnya. Nilai Cutoff yang umum dipakai untuk menunjukkan adanya multikolinieritas adalah nilai $\leq 0,10$ atau nilai $VIF \geq 10$ (Ghozali, 2018). Hasil pengujian multikolinieritas penelitian ini dapat dilihat pada tabel 4 berikut ini:

Tabel 4. Hasil Uji Multikolinieritas

Model		Coefficients ^a						Collinearity Statistics	
		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Tolerance	VIF	
		B	Std. Error	Beta					
1	(Constant)	-3.012	4.775		-.631	.531			
	KAN	.546	.151	.296	3.609	.001	.771	1.297	
	KTR	.293	.134	.228	2.185	.033	.480	2.084	
	SIM	.391	.188	.198	2.074	.043	.573	1.745	
	KOMUNIKASI	.105	.111	.081	.947	.348	.712	1.404	
	KOMPIM	.599	.143	.383	4.199	.000	.624	1.603	

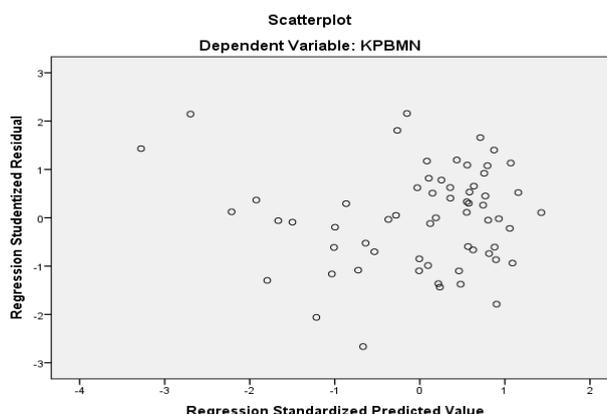
a. Dependent Variable: KPBMN

Sumber: Data Penelitian, 2020 (Data diolah)

Tabel 4 di atas menunjukkan bahwa kelima variabel independen memiliki nilai *Tolerance Value* diatas 0,1 dan VIF kurang dari 10. Sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak ada multikolinieritas antara variabel independen dalam model regresi.

Uji Heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan *variance* dari residual satu pengamatan kepengamatan lainnya (Ghozali, 2018). Jika *variance* dari residual

satu pengamatan ke pengamatan yang lain tetap, maka disebut homoskedastisitas dan jika berbeda disebut heteroskedastisitas. Model regresi yang baik adalah yang homoskedastisitas atau tidak terjadi heteroskedestisitas. Untuk mendeteksi ada atau tidaknya heteroskedestisitas dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu analisis grafik dan analisis statistik. Pengujian heteroskedastisitas yang pertama yaitu analisis grafik dapat dijelaskan melalui gambar berikut:



Sumber: Data Penelitian, 2020 (Data diolah)

Gambar 4. Scatter Plot

Berdasarkan grafik *scatter plot* dapat dilihat bahwa terdapat penyebaran titik-titik yang menyebar secara acak, tidak membentuk sebuah pola tertentu yang jelas, serta tersebar baik diatas maupun dibawah angka 0 pada sumbu Y (Ghozali, 2018).

Pengujian heteroskedastisitas yang kedua dilakukan dengan *uji Glejser* dengan cara meregres nilai absolut residual terhadap variabel independen.

Tabel 5. Hasil Uji Heteroskedastisitas

Model		Coefficients ^a				t	Sig.
		Unstandardized Coefficients	Std. Error	Standardized Coefficients			
		B		Beta			
1	(Constant)	-3,012	4,775		-0,631	0,531	
	KAN	0,546	0,151	0,296	3,609	0,001	
	KTR	0,293	0,134	0,228	2,185	0,033	
	SIM	0,391	0,188	0,198	2,074	0,043	
	KOMUNIKASI	0,105	0,111	0,081	0,947	0,348	
	KOMPIM	0,599	0,143	0,383	4,199	0,000	

a. Dependent Variable: KPBMN

Sumber: Data Penelitian, 2020 (Data diolah)

Berdasarkan tabel 5, hasil uji heteroskedastisitas dengan menggunakan uji Glejser diperoleh nilai signifikansi dari masing-masing variabel independen lebih besar dari tingkat signifikansi (α) sebesar 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa dalam model regresi tidak ditemukan gejala heteroskedastisitas artinya varians dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain adalah tetap (*homoskedastisitas*).

4.4. Pengujian Hipotesis Penelitian

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi berganda dengan bantuan komputer melalui program SPSS 26.0 for Windows. Yang bertujuan untuk menjawab rumusan masalah hipotesis apakah kualitas aparatur negara, kepatuhan pada regulasi, sistem informasi manajemen, komunikasi, komitmen pimpinan berpengaruh secara simultan dan parsial terhadap pengelolaan barang milik negara pada UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi. Hasil

pengujian hipotesis pertama pada penelitian ini dapat dilihat pada tabel 5.9. Regresi berganda digunakan untuk menguji hipotesis satu, sementara uji interaksi digunakan untuk menguji hipotesis dua.

Analisis regresi linear berganda adalah hubungan antara linear antara dua atau lebih variabel independen (X) dengan variabel dependen (Y). Analisis ini untuk mengetahui arah hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen apakah positif atau negatif dan untuk memprediksi nilai dari variabel dependen apabila nilai variabel independen mengalami kenaikan atau penurunan. Dalam penelitian ini analisis berganda digunakan untuk menguji pengaruh kualitas aparatur negara, kepatuhan terhadap regulasi, sistem informasi manajemen, komunikasi, komitmen pimpinan terhadap kualitas pengelolaan barang milik negara pada UIN Sultan Thaha Saifuddin Jambi, Hasil pengujian hipotesis pertama pada penelitian ini dapat dilihat pada table 6 sebagai berikut:

Tabel 6. Hasil Uji Hipotesis

		Coefficients ^a						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	-3.012	4.775		-.631	.531		
	KAN	.546	.151	.296	3.609	.001	.771	1.297
	KTR	.293	.134	.228	2.185	.033	.480	2.084
	SIM	.391	.188	.198	2.074	.043	.573	1.745
	KOMUNIKASI	.105	.111	.081	.947	.348	.712	1.404
	KOMPIM	.599	.143	.383	4.199	.000	.624	1.603

a. Dependent Variable: KPBMN

Sumber: Data Penelitian, 2020 (Data diolah)

Berdasarkan tabel 6 maka persamaan regresi penelitian ini adalah sebagai berikut:

$$\hat{Y} = -3,012 + 0,546X_{KAN} + 0,293X_{KTR} + 0,39X_{SIM} + 0,105X_{KOM} + 0,599X_{KOMPIM}$$

Persamaan regresi tersebut menunjukkan bahwa variabel X_{KAN}, X_{KTR}, X_{SIM}, X_{KOM}, X_{KOMPIM} memiliki koefisien regresi yang positif. Hal ini berarti bahwa apabila kualitas aparatur negara, kepatuhan terhadap regulasi, sistem informasi manajemen, komunikasi dan komitmen pimpinan semakin meningkat, maka akan semakin meningkat atau baik pula pengelolaan barang milik negara.

Berdasarkan persamaan regresi berganda diatas dapat diinterpretasikan sebagai berikut:

1. Nilai Konstanta sebesar -3,012 memberikan arti bahwa apabila kualitas aparatur negara (X₁), kepatuhan terhadap regulasi (X₂), sistem informasi manajemen (X₃), komunikasi (X₄), dan komitmen pimpinan (X₅) diasumsikan = 0, maka kualitas pengelolaan barang milik negara (Ŷ) bernilai -3,012.

2. Koefisien regresi variabel kualitas aparatur negara (X₁) sebesar 0,546 memberikan arti bahwa dengan peningkatan kualitas aparatur negara akan mendorong peningkatan kualitas pengelolaan barang milik negara, dengan asumsi variabel lain tetap.
3. Koefisien regresi variabel kepatuhan terhadap regulasi (X₂) sebesar 0,293 memberikan arti bahwa dengan peningkatan Kepatuhan terhadap regulasi maka akan mendorong peningkatan kualitas pengelolaan barang milik negara, dengan asumsi variabel lain tetap.
4. Koefisien regresi variabel sistem informasi manajemen (X₃) sebesar 0,391 memberika arti bahwa dengan peningkatan sistem informasi manajemen akan akan mendorong peningkatan kualitas pengelolaan barang milik negara, dengan asumsi variabel lain tetap.
5. Koefisien regresi variabel komunikasi (X₄) sebesar 0,105 memberikan arti bahwa dengan peningkatan komunikasi akan mendorong peningkatan kualitas pengelolaan barang milik negara, dengan asumsi variabel lain tetap.

6. Koefisien regresi variabel komitmen pimpinan (X_5) sebesar 0,599 memberikan arti bahwa dengan peningkatan komitmen pimpinan akan mendorong peningkatan kualitas pengelolaan barang milik negara, dengan asumsi variabel lain tetap.

Berdasarkan model persamaan hipotesis pertama dilaksanakan Uji signifikansi simultan (Uji statistik F),

Uji signifikansi parameter individual (Uji statistik t) dan uji koefisien determinasi (*Adjusted R2*).

Hasil pengujian statistik F untuk melihat pengaruh secara simultan kualitas aparatur negara, kepatuhan terhadap regulasi, sistem informasi manajemen, komunikasi, komitmen pimpinan terhadap kualitas pengelolaan barang milik negara pada UIN Sultan Thaha Saifuddin Jambi.

Tabel 7. Hasil Uji Statistik F

ANOVA^a

Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1 Regression	2889.724	5	577.945	27.256	.000 ^b
Residual	1187.453	56	21.205		
Total	4077.177	61			

a. Dependent Variable: KPBMN

b. Predictors: (Constant), KOMPIM, SIM, KAN, KOMUNIKASI, KTR

Sumber: *Data Penelitian, 2020 (Data diolah)*

Kriteria pengambilan Keputusan menggunakan nilai signifikansi F pada taraf signifikansi 5 %. Dari tabel di atas, di peroleh nilai signifikansi sebesar 0,000 artinya $< 0,05$ sehingga dari hasil pengujian ini dapat disimpulkan bahwa kualitas aparatur negara, kepatuhan pada regulasi, sistem informasi manajemen, komunikasi, komitmen pimpinan secara simultan berpengaruh signifikan terhadap kualitas pengelolaan barang milik negara pada UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi. Sehingga hipotesis yang menyatakan ada pengaruh variabel independen secara simultan terhadap variabel dependen dapat di terima.

Kriteria pengambilan keputusan menggunakan nilai signifikansi t pada taraf signifikansi 5%. Berdasarkan hasil pengujian maka secara parsial pengaruh masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen diuraikan sebagai berikut:

1). Variabel Kualitas Aparatur Sipil Negara

Hasil pengujian statistik t pada variabel kualitas aparatur sipil negara bisa dilihat dari tabel 8 berikut:

Tabel 8. Hasil Uji Statistik t

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	21.554	4.817		4.474	.000
KAN	1.040	.196	.565	5.305	.000

a. Dependent Variable: KPBMN

Sumber: *Data Penelitian, 2020 (Data diolah)*

Dari tabel 8 di atas, variabel kualitas aparatur negara (X_1) memiliki tingkat signifikansi adalah sebesar 0,000 artinya $< 0,05$ dan koefisien regresi bernilai positif sehingga dari pengujian ini dapat disimpulkan bahwa variabel kualitas aparatur negara

berpengaruh positif dan signifikan terhadap variabel kualitas Pengelolaan barang milik negara.

2). Variabel Kepatuhan Terhadap Regulasi

Hasil pengujian statistik t pada variabel kepatuhan terhadap regulasi bisa dilihat dari tabel di bawah ini:

Tabel 9. Hasil Uji Statistik t

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	22.058	3.966		5.562	.000
KTR	.815	.129	.634	6.346	.000

a. Dependent Variable: KPBMN

Sumber: *Data Penelitian, 2020 (Data diolah)*

Selanjutnya berdasarkan tabel di atas, variabel kepatuhan terhadap regulasi (X_2) adalah sebesar 0,000 artinya $< 0,05$ dan koefisien regresi bernilai positif sehingga dari pengujian ini dapat disimpulkan bahwa variabel kepatuhan terhadap regulasi berpengaruh

positif dan signifikan terhadap kualitas Pengelolaan barang milik negara.

3). Variabel Sistem Informasi Manajemen

Hasil pengujian statistik t pada variabel sistem informasi manajemen bisa dilihat dari tabel 10.

Tabel 10. Hasil Uji Statistik t

Coefficients ^a					
Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	24.863	5.234		4.750	.000
SIM	.949	.224	.480	4.236	.000

a. Dependent Variable: KPBMN

Sumber: Data Penelitian, 2020 (Data diolah)

Berdasarkan tabel 10 di atas, variabel sistem informasi manajemen (X_3) adalah sebesar 0,000 artinya $< 0,05$ dan koefisien regresi bernilai positif sehingga dari pengujian ini dapat disimpulkan bahwa variabel sistem informasi manajemen berpengaruh

positif dan signifikan terhadap variabel kualitas pengelolaan barang milik negara.

4). Variabel Komunikasi

Hasil pengujian statistik t pada variabel sistem informasi manajemen bisa dilihat dari tabel 11 berikut:

Tabel 11. Hasil Uji Statistik t

Coefficients ^a					
Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	27.145	4.928		5.508	.000
KOMUNIKASI	.601	.149	.462	4.039	.000

a. Dependent Variable: KPBMN

Sumber: Data Penelitian, 2020 (Data diolah)

Berdasarkan tabel 11 di atas, variabel komunikasi (X_4) adalah sebesar 0,000 artinya $> 0,05$ dan koefisien regresi bernilai positif sehingga dari pengujian ini dapat disimpulkan bahwa variabel komunikasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap variabel kualitas pengelolaan barang milik negara.

5). Variabel Komitmen Pemimpin

Hasil pengujian statistik t pada variabel komitmen pimpinan bisa dilihat dari tabel 12 di bawah ini.

Tabel 12. Hasil Uji Statistik t

Coefficients ^a					
Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	19.202	3.792		5.064	.000
KOMPIM	1.079	.146	.691	7.399	.000

a. Dependent Variable: KPBMN

Sumber: Data Penelitian, 2020 (Data diolah)

Berdasarkan tabel 12 di atas, variabel komitmen pimpinan (X_5) adalah sebesar 0,000 artinya $< 0,05$ dan koefisien regresi bernilai positif sehingga dari pengujian ini dapat disimpulkan bahwa variabel komitmen pimpinan berpengaruh positif dan signifikan terhadap variabel kualitas pengelolaan barang milik negara.

Koefisien Determinasi (R^2) dilakukan untuk melihat besar variabel dari variabel independen secara bersama-sama dalam mempengaruhi variabel dependen. Berikut ini merupakan hasil pengujian koefisien determinasi yang disajikan pada tabel 13 dibawah ini:

Tabel 13. Koefisien Determinasi

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.842 ^a	.709	.683	4.60484

a. Predictors: (Constant), KOMPIM, SIM, KAN, KOMUNIKASI, KTR

b. Dependent Variable: KPBMN

Sumber: Data Penelitian, 2020 (Data diolah)

Pada tabel 13 diketahui nilai R square sebesar 0,709 hal ini menunjukkan variabel kualitas aparatur negara, kepatuhan terhadap regulasi, sistem informasi manajemen, komunikasi, komitmen pimpinan sebagai variabel independen memiliki hubungan yang kuat sebesar 70,9 % dengan variabel kualitas pengelolaan barang milik negara. Nilai adjusted R2 atau koefisien determinasi digunakan untuk mengetahui kemampuan variabel bebas untuk berkontribusi terhadap variabel tetapnya. Nilai adjusted R2 sebesar 0,683 menunjukkan bahwa variabel independen yakni kualitas aparatur negara, kepatuhan terhadap regulasi, sistem informasi manajemen, komunikasi, komitmen pimpinan secara bersama-sama mampu menjelaskan 68,3% variabel pengelolaan barang milik negara, sedangkan sisanya sebesar 31,7% dijelaskan oleh variabel lain yang tidak dimasukkan kedalam model penelitian ini.

4.5. Pembahasan

4.5.1. Pengaruh Kualitas Aparatur Negara Terhadap Kualitas Pengelolaan Barang Milik Negara

Pengujian pengaruh variabel kualitas aparatur negara terhadap variabel kualitas pengelolaan barang milik negara menggunakan uji t dan di peroleh hasil dimana level signifikansi variabel kualitas aparatur negara (X_1) sebesar 0,000 artinya $< 0,05$ dan koefisien regresi sebesar 1,040 sehingga dapat disimpulkan bahwa kualitas aparatur negara berpengaruh positif dan signifikan terhadap variabel kualitas pengelolaan barang milik negara pada UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi. Hal ini dapat dipahami karna kapasitas aparatur negara yang berkaitan dengan pengelolaan barang milik negara pada UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi rata-rata memiliki jenjang pendidikan S1,S2 dan S3 adalah sebesar 57 orang atau 91,93 %. Selanjutnya dari segi pengalaman kerja sebagian besar aparatur negara di UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi yang memiliki pengalaman lebih dari 3 tahun dalam pengelolaan barang milik negara adalah sebanyak 37 orang atau 59,67 %. Hal ini penting karena aparatur negara merupakan pilar penyangga utama sekaligus penggerak roda suatu organisasi dalam usaha mewujudkan visi dan misi serta tujuan dari organisasi tersebut. Mengingat pentingnya kualitas aparatur negara, pimpinan UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi harus memastikan bahwa aparatur negara telah dikelola sebaik mungkin sehingga akan mampu memberikan kontribusi secara optimal dalam pencapaian tujuan organisasi.

Hasil penelitian ini konsisten dengan hasil penelitian lain terkait pengelolaan barang milik negara, seperti hasil penelitian yang dilakukan oleh (Wahyuni et al., 2018) yang mengemukakan bahwa Kompetensi sumber daya manusia berpengaruh terhadap pengelolaan barang milik Negara/daerah, semakin tinggi tingkat kompetensi sumber daya manusia maka pengelolaan barang milik negara/daerah semakin baik. Begitu juga dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh (Umum et al., 2010) Sumber daya yang memberikan pengaruh yang signifikan dalam implementasi kebijakan pengelolaan aset. Kuantitas para pelaksana pengelola aset daerah di Kota Tangerang perlu ditambah, dan kualitas para pengelola aset dapat lebih ditingkatkan, antara lain kesesuaian latar belakang pendidikan dengan tugas dan fungsi para pengelola aset tersebut. Begitu juga dengan hasil penelitian (Nugroho & Kiranti, 2017) memberikan bukti bahwa Kompetensi aparatur sangat diperlukan sebagai sumber daya manusia yang dimiliki perusahaan. Namun penelitian ini bertolak belakang dengan penelitian (Azhar et al., 2013), yang menunjukkan bahwa kualitas aparatur daerah tidak berpengaruh terhadap manajemen aset dikarenakan banyak pengurus barang yang belum memenuhi syarat pendidikan tertentu, kurangnya sosialisasi terhadap pengelola barang, pengurus barang tidak mengetahui tugas dan fungsinya terkait dengan pengelolaan barang milik daerah, dan peraturan daerah tentang pengelolaan barang milik daerah belum disusun secara rinci dan disesuaikan dengan kondisi daerah dalam mengatur pengelolaan barang milik daerah di Pemerintah Kota Banda Aceh.

4.5.2. Pengaruh Kepatuhan Terhadap Regulasi Terhadap Kualitas Pengelolaan Barang Milik Negara

Pengujian pengaruh variabel kepatuhan terhadap regulasi terhadap variabel kualitas pengelolaan barang milik negara menggunakan uji t dan di peroleh hasil dimana level signifikansi variabel kualitas aparatur negara (X_2) sebesar 0,000 artinya $< 0,05$ dan koefisien regresi sebesar 0,815 sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel kepatuhan terhadap regulasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap variabel kualitas pengelolaan barang milik negara pada UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi. Kepatuhan pada regulasi dalam pengelolaan barang milik negara merupakan pelaksanaan dari azas kepastian hukum dan agar implementasi suatu kebijakan pengelolaan barang milik negara berhasil secara efektif dan efisien, para

pelaksana (implementors) harus mengetahui apa yang harus dilakukan dan mempunyai kemampuan untuk melakukan kebijakan itu. UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi dalam penerapan kepatuhan terhadap regulasi sudah membuat Keputusan Rektor No: 43 tahun 2020 tanggal 01 Oktober 2020 tentang pedoman pelaksanaan pengadaan barang/jasa badan Layanan Umum (BLU) pada UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi. Yang merupakan salah satu bagian strategis dalam rangka pengelolaan barang milik negara di UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi terutama dalam proses pengadaan barang/jasa BLU.

Pengaruh kepatuhan pada regulasi secara parsial berpengaruh signifikan terhadap kualitas pengelolaan barang milik negara dimungkinkan karena pemerintah sudah mengeluarkan banyak peraturan tentang pengelolaan barang milik negara yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2005, Peraturan Pemerintah No 06 Tahun 2006 dan perubahannya pertama pada Peraturan Pemerintah No. 38 Tahun 2008 dan perubahan kedua pada Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 2014, serta PP No. 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, Keputusan Menteri Agama RI Nomor 23 Tahun 2014 tentang pedoman, Penggunaan, pemanfaatan, penghapusan, dan pemindahtanganan barang milik negara di lingkup Kementerian Agama RI.

Pengaruh kepatuhan pada regulasi secara parsial berpengaruh signifikan terhadap kualitas pengelolaan barang milik negara sesuai dengan penelitian terdahulu dari (Azhar, 2017b) yang membuktikan adanya pengaruh yang signifikan antara regulasi dengan manajemen aset daerah, karena regulasi merupakan alat bagi aparatur dalam menjalankan tugas dan fungsinya untuk mendukung pelaksanaan manajemen aset daerah. Berdasarkan penelitian (Arlini et al., 2014) menyatakan bahwa semakin lengkap dan mudah suatu regulasi untuk diimplementasikan dan dipahami akan menghasilkan manajemen aset yang semakin tertib dan teratur.

4.5.3. Pengaruh Sistem Informasi Manajemen Terhadap Kualitas Pengelolaan Barang Milik Negara

Pengujian pengaruh variabel sistem informasi manajemen terhadap variabel kualitas pengelolaan barang milik negara menggunakan uji t dan di peroleh hasil dimana level signifikansi variabel sistem informasi manajemen (X_3) sebesar 0,000 artinya $< 0,05$ dan koefisien regresi sebesar 0,949 sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel sistem informasi manajemen berpengaruh positif dan signifikan terhadap variabel kualitas pengelolaan barang milik negara pada UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.

Peneliti berpendapat bahwa untuk saat ini perkembangan sistem informasi manajemen di UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi sudah sangat baik, ini terlihat dengan adanya fasilitas internet di setiap

fakultas dan Unit kerja yang dapat digunakan untuk pengiriman data dan informasi yang dibutuhkan dan juga dengan adanya aplikasi yang dapat digunakan untuk mempermudah dalam proses pembuatan laporan pengelolaan barang milik negara, akan tetapi sistem informasi ini belum dapat dimanfaatkan secara optimal. Hasil observasi pada saat pengambilan kuesioner diperoleh informasi bahwa fakta yang ada di lapangan masih sedikitnya pegawai yang memahami secara detail dan baik dalam mengolah data transaksi keuangan dan Barang milik negara secara sistem.

UIN sulthan Thaha Saifuddin Jambi dalam penerapan penggunaan aplikasi SIMAK BMN dan SIMAN telah terlaksana dengan baik, hal ini merupakan point penting dan menjadi tolak ukur dalam mewujudkan sistem informasi manajemen pengelolaan barang milik negara yang terintegrasi di UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi. Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN) merupakan sistem terpadu yang merupakan gabungan prosedur manual dan komputerisasi dalam rangka menghasilkan data transaksi untuk mendukung penyusunan neraca. Dan pelaksanaan akuntansi BMN dibantu dengan perangkat lunak (software) SIMAK-BMN yang memungkinkan penyederhanaan dalam proses manual dan mengurangi tingkat kesalahan manusia (human error) dalam pelaksanaannya. Sedangkan Aplikasi SIMAN merupakan aplikasi yang digunakan untuk mendukung proses pengelolaan BMN, yang meliputi perencanaan, penggunaan, pemanfaatan, pemeliharaan, penatausahaan, penghapusan, dan pemindahtanganan aset negara berbasis internet yang dapat diakses oleh Pengelola dan Pengguna.

Hasil Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Rosihan et al., 2017) yang menunjukkan Faktor sistem informasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap manajemen aset pada Pemerintah Provinsi Papua dimana Penggunaan aplikasi sistem informasi tersebut sudah menjadi bagian yang penting untuk mengelola aset daerah karena akan lebih efisien dan akurat. Juga sejalan dengan penelitian (Arlini et al., 2014) semakin baik sistem informasi yang digunakan akan menghasilkan manajemen aset yang andal, akurat dan tepat waktu. Serta penelitian (Asset & Milik, 2018) menyatakan bahwa penggunaan sistem informasi mempengaruhi kegiatan penatausahaan aset daerah di Kabupaten Garut.

4.5.4. Pengaruh Komunikasi Terhadap Kualitas Pengelolaan Barang Milik Negara

Pengujian pengaruh variabel komunikasi terhadap variabel kualitas pengelolaan barang milik negara menggunakan uji t dan di peroleh hasil dimana level signifikansi variabel komunikasi (X_4) sebesar 0,000 artinya $< 0,05$ dan koefisien regresi sebesar 0,601 sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel komunikasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap variabel kualitas pengelolaan barang milik negara pada UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.

Pada UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi variabel komunikasi berpengaruh terhadap kualitas pengelolaan barang milik negara dimungkinkan karena disebabkan berbagai faktor utama: a) Kejelasan informasi kebijakan pengelolaan barang milik negara berupa komunikasi sudah berjalan secara optimal, di mana pelaksanaan kebijakan sudah bisa dipahami secara utuh dan menyeluruh oleh semua aparat b) Akurasi informasi seperti cakupan dan ketepatannya sudah berjalan sebagaimana yang diharapkan. Para pelaksana dilapangan dalam mengkomunikasikan atau menyampaikan informasi sudah memiliki cakupan informasi yang sesuai dengan sasaran kebijakan. c) sudah mulai terjadwalnya pertemuan atau rapat secara berkala terkait pembahas secara internal permasalahan – permasalahan yang di hadapi pengelola barang di setiap fakultas dan unit terkait di UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.

Komunikasi pemerintahan dalam konteks organisasi pemerintahan dan arus penyampaian dan penerimaan pesan dilakukan melalui jaringan yang sifat hubungannya saling tergantung satu sama lain berdasarkan aturan-aturan formal. Komunikasi formal yang terjadi di antara pelaksana pengelolaan barang milik negara merupakan komunikasi formal yang melalui garis kewenangan yang telah ditetapkan. Dari kewenangan ini bisa menyediakan saluran-saluran prosedur kerja, instruksi, dan gagasan dan umpan balik mengenai pelaksanaan pekerjaan bawahan disampaikan ke bawah dari pimpinan yang lebih tinggi ke karyawan di bawahnya. Komunikasi formal juga menetapkan saluran komunikasi ke atas berlangsung, dimana bawahan bisa menyampaikan permasalahan pekerjaannya dengan atasan, ide-ide, sikap dan perasaan mereka sendiri. Sehingga variabel komunikasi sangat di perlukan dalam pengelolaan barang milik negara.

Hasil Penelitian ini sesuai dengan hasil penelitian sebelumnya di antaranya penelitian (Umum et al., 2010) menunjukkan adanya Hubungan antara faktor komunikasi terhadap implementasi kebijakan pengelolaan aset daerah di Kota Tangerang cukup kuat, dan mempunyai pengaruh yang signifikan. Juga sejalan dengan penelitian (Munaim, 2012) menunjukan faktor komunikasi dalam implementasi kebijakan pengelolaan barang milik negara sudah berjalan cukup baik melalui komunikasi langsung maupun melalui berbagai media , Pelatihan dan pendidikan serta sosialisasi kebijakan walaupun belum semua implementor di tingkat SKPD memahami dengan baik dan benar seluruh proses pengelolaan barang milik negara di provinsi nusa tenggara barat. Namun hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian (Nancy, 2015) dimana variabel komunikasi belum berjalan dengan baik yang disebabkan karena kurangnya sosialisasi, sehingga dimana perlukan Adanya pola komunikasi yang intensif, dimana sosialisasi dan koordinasi dilaksanakan secara komprehensif kepada stakeholder pengambil kebijakan sampai kepada unit yang paling bawah pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Sigi.

4.5.5. Pengaruh Komitmen Pimpinan Terhadap Kualitas Pengelolaan Barang Milik Negara

Pengujian pengaruh variabel komitmen pimpinan terhadap variabel kualitas pengelolaan barang milik negara menggunakan uji t dan di peroleh hasil dimana level signifikansi variabel komitmen pimpinan (X_5) sebesar 0,000 artinya $< 0,05$ dan koefisien regresi sebesar 1,079 sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel komitmen pimpinan berpengaruh positif dan signifikan terhadap variabel kualitas pengelolaan barang milik negara pada UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.

Peneliti berpendapat bahwa untuk saat ini komitmen pimpinan dalam pengelolaan barang milik negara di UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi sudah sangat baik, hal ini terlihat dari rektor dapat mengatur dan memberikan pengaruh dan memberikan motivasi agar pengelolaan barang milik negara di UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi bisa menjadi lokomotif perubahan sesuai visi dan misi rektor.

Hasil Penelitian ini sejalan penelitian yang dilakukan oleh (Munaim, 2012), menyatakan adanya komitmen pimpinan dalam pelaksanaan peraturan dan petunjuk teknis pelaksanaan pengelolaan barang milik daerah merupakan faktor pendukung terlaksananya kebijakan pengelolaan barang milik daerah di setiap SKPD pada Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat. Selanjutnya Penelitian Gusman (2012) sebagai apapun suatu peraturan disusun, tanpa adanya komitmen dari pimpinan untuk menerapkan peraturan tersebut maka peraturan tersebut tidak akan berhasil dalam penerapannya. Oleh karena itu, kepatuhan pada regulasi yang dilakukan oleh para pelaksana pengelola barang milik negara membutuhkan komitmen pimpinan. Hasil penelitian (Halim, 2012) menyatakan bahwa peranan pimpinan menunjukkan pengaruh positif dan signifikan dalam meningkatkan pengelolaan keuangan dan aset daerah pada Dinas PPKA Kabupaten Banggai Kepulauan.

4.5.6. Pengaruh Kualitas Aparatur Negara, Kepatuhan Terhadap Regulasi, Sistem Informasi Manajemen, Komunikasi dan Komitmen Pimpinan Terhadap Kualitas Pengelolaan Barang Milik Negara Secara Simultan

Pengujian pengaruh variabel kualitas aparatur negara, kepatuhan terhadap regulasi, sistem informasi manajemen, komunikasi, komitmen pimpinan terhadap kualitas pengelolaan barang milik negara menggunakan uji F dan di peroleh hasil dimana level signifikansi sebesar 0,000 artinya $< 0,05$ sehingga dapat disimpulkan bahwa kualitas aparatur negara, Kepatuhan terhadap regulasi, sistem informasi manajemen, komunikasi, komitmen pimpinan secara simultan berpengaruh signifikan dalam mendorong peningkatan kualitas pengelolaan barang milik negara pada UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi. Selain itu, hasil pengujian ini menunjukkan bahwa model ini dapat dipakai karna model ini mampu menjelaskan perubahan

terhadap variabel kualitas pengelolaan barang milik negara.

Sejalan dengan penelitian ini, Penelitian dari (Arlini et al., 2014) menunjukkan bahwa kompetensi SDM, sistem informasi, regulasi, dan kompensasi berpengaruh terhadap manajemen aset pada satuan kerja di lingkungan BKKBN se Indonesia baik secara simultan maupun parsial. Penelitian (Lu, 2011) menyimpulkan bahwa proses manajemen secara bersamaan dipengaruhi oleh siklus hidup aset, strategi sumber daya manusia, Sistem informasi dan sumber daya, dan monitoring, integritas, dan transparansi.

Ditambah lagi Penelitian (Rosihan et al., 2017) juga menyatakan kualitas aparatur, regulasi, sistem informasi dan komitmen secara simultan atau bersama-sama berpengaruh terhadap manajemen aset Pemerintah Provinsi Papua. Hal ini di tambah lagi dengan penelitian (Azhar, 2017a) yang menyatakan bahwa Kualitas aparatur daerah dan regulasi secara bersama-sama berpengaruh secara signifikan terhadap manajemen aset pada SKPD di Pemko Banda Aceh.

5. SIMPULAN DAN SARAN

5.1. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan , maka dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut:

1. Kualitas aparatur negara berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap pengelolaan barang milik negara pada UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi. Artinya Untuk dapat meningkatkan pengelolaan barang milik negara, maka UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi dapat meningkatkan kualitas aparatur negara.
2. Kepatuhan pada regulasi berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap pengelolaan barang milik negara pada UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi. Artinya Untuk dapat meningkatkan pengelolaan barang milik negara, maka UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi harus selalu berpedoman terhadap regulasi yang sudah ditetapkan oleh pemerintah khususnya dalam pengelolaan barang milik negara.
3. Sistem informasi manajemen berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap pengelolaan barang milik negara pada UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi. Artinya Untuk dapat meningkatkan pengelolaan barang milik negara, maka UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi harus sudah mengembangkan sistem informasi manajemen yang terintegrasi untuk mendukung pengelolaan barang milik negara yang efektif dan efisien.
4. Komunikasi berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap pengelolaan Barang Milik Negara pada UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi. Artinya agar dapat meningkatkan pengelolaan barang milik negara, maka UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi harus menjalin

komunikasi yang terstruktur dan berkelanjutan antar semua lini yang ada agar komunikasi bisa cepat tersampaikan ke bawahan.

5. Komitmen pimpinan berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap pengelolaan Barang Milik Negara pada UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi. Ini berarti supaya meningkatkan pengelolaan barang milik negara, maka UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi selalu terlaksana dengan sebaik-baiknya maka komitmen pimpinan harus menjadi dasar dan motivasi agar pengelolaan barang milik negara bisa selalu lebih baik.
6. Kualitas aparatur negara, kepatuhan pada regulasi, sistem informasi manajemen, komunikasi dan komitmen pimpinan secara bersama-sama berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengelolaan barang milik negara pada UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi. Ini berarti ketika aparatur negara berkualitas, kepatuhan regulasi tinggi, sistem informasi manajemen berjalan baik, Komunikasi berjalan baik dan komitmen pimpinan berjalan dengan bagus dan konsisten maka secara simultan variabel-variabel tersebut akan mampu menciptakan pengelolaan barang milik negara yang baik.

5.2 Saran

Bertolak dari kesimpulan penelitian, maka penulis mencoba memberikan masukan atau pertimbangan berupa saran-saran sebagai berikut:

1. UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi perlu memberikan pelatihan-pelatihan yang berkaitan dengan pengelolaan barang milik negara dan mengoptimalkan pemanfaatan sistem informasi yang terintegrasi sehingga dapat meningkatkan kualitas aparatur negara.
2. Penyusunan tata cara pelaksanaan yang dikemas dalam Standard Operating Procedures (SOP) pengelolaan barang milik negara agar dapat segera diselesaikan, sehingga efektivitas dan efisiensi pengelolaan aset negara pada UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi dapat cepat ditingkatkan.
3. Bagi peneliti selanjutnya yang tertarik meneliti tentang Pengelolaan Barang Milik Negara disarankan dapat menambahkan jumlah sampel, Periode penelitian serta menambahkan variabel - variabel lainnya yang berhubungan dengan pengelolaan barang milik negara, misalnya struktur organisasi dan motivasi dan selain menerapkan metode survey melalui penyebaran angket/kuisisioner juga melakukan wawancara untuk mendapatkan informasi tambahan.

DAFTAR REFERENSI

- Arlini, M., Darwanis, & Abdullah, S. (2014). Studi Pada Satuan Kerja Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional di Indonesia.

- Pascasarjana Universitas Syiah Kuala, 10(4), 66–75.
- Asset, P., & Milik, B. (2018). Optimalisasi Penggunaan Teknologi Informasi dalam. *Jurnal Aset (Akuntansi Riset)*, 10(2), 189–197.
- Azhar, I. (2017a). Pengaruh Kualitas Aparatur Daerah dan Regulasi terhadap Manajemen Aset pada Pemerintah Kota Banda Aceh. *Jurnal Penelitian Akuntansi (JENSI)*, 1(1), 49–61. <http://prodipps.unsyiah.ac.id/Jurnalnia/index.php/volume-2/41-vol2-no-1>
- Azhar, I. (2017b). Pengaruh Sistem Informasi terhadap Manajemen Aset pada Pemerintah Kota Banda Aceh. *Jurnal Penelitian Ekonomi Akuntansi (JENSI)*, 1(2), 150–160.
- Azhar, I., Darwanis, & Abdullah, S. (2013). Pengaruh Kualitas Aparatur Daerah, Regulasi, dan Sistem Informasi terhadap Manajemen Aset (Studi pada SKP Pemerintah Kota Banda Aceh). *Akuntansi*, 2(1), 15–26. <http://prodipps.unsyiah.ac.id/Jurnalnia/index.php/volume-2/41-vol2-no-1>
- DHendianto-BiroHukum BPK-RI/10/16/2006 1. (2004). 1–25.
- Halim, R. (2012). Pengaruh Komitmen Organisasi dan Peranan Kepemimpinan Dalam Meningkatkan Pengelolaan Keuangan Daerah pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Kabupaten Banggai Kepulauan. *Jurnal Academica Fisip Untad*, 04(01), 816–829.
- Indonesia, P. R. (2006). *Indische Comptabiliteitswet. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara*, 1–61.
- Lu, Y. (2011). *Public Asset Management: Empirical Evidence From the State Governments in the United States*. *Florida Atlantic University*, 53(9), 1689–1699.
- Mukhtar, H. A. dan M. (2016). *Efektivitas Pimpinan: Kepemimpinan Transformatif dan Komitmen Organisasi - - Google Buku*. In Deepublish. https://books.google.co.id/books?hl=id&lr=&id=_dgwDwAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA4&dq=holistik+coach+terhadap+kinerja+perawat&ots=JzT2_wSAlk&sig=P_U64IOYvilKuSB3o9VZPZRTNpc&redir_esc=y#v=onepage&q&f=false
- Munaim. (2012). *Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah pada Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat*.
- Munandar, H., & Suherman, M. (2016). *Aktivitas Komunikasi Pemerintahan Ridwan Kamil di Media sosial. Hubungan Masyarakat*, 2(1), 423–430.
- Nancy. (2015). *Implementasi Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Sigi. Jurnal Katalogis*, 3(2), 160–172.
- Nugroho, L., & Kiranti, D. E. (2017). Pengaruh Motivasi Dan Kompetensi Aparatur Terhadap Kualitas Informasi Akuntansi Barang Milik Negara. *Jurnal SIKAP (Sistem Informasi, Keuangan, Auditing Dan Perpajakan)*, 2(1), 20. <https://doi.org/10.32897/sikap.v2i1.61>
- Pemerintah Republik Indonesia. (2014). *Peraturan pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533. Jdih Bpk Ri*, 1–113. <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/5464/pp-no-27-tahun-2014>
- Pinatik, S., Ilat, V., & Kolinug, M. (2015). Analisis Pengelolaan Aset Tetap Pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kota Tomohon. *Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi*, 3(1), 818–830. <https://doi.org/10.35794/emba.v3i1.7556..>
- Rosihan, R., Bharanti, B. E., & Ratang, W. (2017). Pengaruh Kualitas Aparatur Daerah, Regulasi, Sistem Informasi Dan Komitmen Terhadap Manajemen Aset. *Jurnal Keuda Kajian Ekonomi Dan Keuangan Daerah*, 2(1), 1–16.
- Silalahi, U. (2004). *Komunikasi Pemerintahan : Mengirim Dan Menerima Informasi Tugas Dan Informasi Publik. Jurnal Administrasi Publik Unpar*, 3(1), 36–54.
- Simamora, R., & Halim, A. (2012). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pengelolaan Aset Pasca Pemekaran Wilayah dan Pengaruhnya Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah di Kab. Tapanuli Selatan. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 10(1), 47–61. <http://journal.unikal.ac.id/index.php/ekonomi/article/view/338>
- Sulistiawati, E. (2016). Faktor – Faktor yang Mempengaruhi Pengelolaan Barang Milik Daerah Pada SKPD Pemerintah Kabupaten Langkat dengan Peranan Pimpinan Sebagai Variabel Moderating. 1–147. <http://repositori.usu.ac.id/handle/123456789/548>
- Umum, G., Kota, T., Dan, T., Geografis, K., & Tangerang, K. (2010). *Studi persepsi..., Inayah, FISIP UI*, 2010. 48–108.
- Wahyuni, S., Fadah, I., & Tobing, D. S. (2018). Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia Dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Melalui Pengelolaan Barang Milik Daerah. *Bisma*, 12(1), 66. <https://doi.org/10.19184/bisma.v12i1.7602>